

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan agama Islam yang dikenal sebagai pondok pesantren muncul pada abad ke-13. Beberapa abad kemudian muncul sebagai tempat pengajian untuk orang-orang yang ingin belajar tentang agama Islam. Tempat pengajian ini dikenal sebagai pesantren karena menyediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang belajar agama Islam. Pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan agama Islam yang bergengsi karena memiliki struktur yang sederhana. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, dengan Kiai sebagai figur sentral dan masjid sebagai pusat kegiatannya. Pengajaran agama Islam pada pondok pesantren juga berada di bawah bimbingan Kiai yang diikuti oleh Santri sebagai kegiatan utamanya (IAI, 2018).

Sebagai organisasi nirlaba yang tidak mengutamakan keuntungan, Pondok pesantren juga dapat didefinisikan sebagai lembaga non-pemerintah yang beroperasi di luar Undang-Undang yang ditetapkan dan menyediakan layanan sukarela untuk membantu orang lain mengatasi masalah sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 "*Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan ditugaskan untuk kepentingan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tetapi tidak mempunyai anggota*". -organisasi keuangan (Salsabila Nurul Azmi, 2019). Dalam hal ini, Pondok Pesantren dapat dianggap sebagai satu entitas.

Semua entitas memiliki visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, diperlukan upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut. Terutama sebuah pondok pesantren yang besar, memerlukan pengelolaan yang baik dari berbagai aspek yang ada di Pondok Pesantren tersebut. Salah satu elemen yang paling penting dalam pengelolaan ini adalah keuangan dan pencatatan pelaporan keuangan, yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup organisasi. Ilmu akuntansi diperlukan untuk mengelola dan mencatat transaksi keuangan (Suherman, 2019).

Salah satu komponen utama manajemen keuangan suatu organisasi adalah akuntansi. Jika akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis, informasi tersebut harus memiliki empat karakteristik yaitu relevan, kredibel, dapat dibandingkan, dan dipahami oleh pihak yang menggunakan laporan keuangan. Pelaporan yang sistematis, logis, dan mudah dianalisis diperlukan untuk memahami laporan keuangan dengan baik (Rahma, 2020).

Laporan keuangan menyimpan informasi tentang keuangan suatu perusahaan selama periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja bisnis, khususnya di bidang keuangan (Sunendar, 2019: hal 17). Susunan laporan keuangan terbagi menjadi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan (Hidayat, 2018).

Rahmi (2014) berpendapat bahwa laporan keuangan dibuat untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan keuangan. Oleh karena

itu, untuk membuat laporan keuangan ini, harus sesuai dengan standar akuntansi. Standar akuntansi berfungsi untuk menjadi acuan untuk membantu entitas dalam menyusun laporan keuangan agar menjadi seragam. Standar ini mencakup pedoman untuk penyusunan laporan keuangan, salah satunya bertujuan untuk membuat laporan keuangan yang seragam sehingga pengguna dapat membaca dan menganalisis laporan keuangan dengan lebih mudah. Laporan keuangan yang tidak dibuat sesuai dengan standar yang berlaku akan dipertanyakan kredibilitas dan relevansinya serta menyesatkan penggunanya. Laporan keuangan yang dibuat akan semakin meyakinkan dalam kinerja sebuah entitas tersebut. Menurut Gina Sakinah (2016) dalam proses pengambilan keputusan, laporan keuangan diperlukan untuk memprediksi, membandingkan, dan menilai dampak keputusan keuangan terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Mengingat kewajiban menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan. Menurut Penny Kusumawati (2017). Akuntabilitas mengacu pada kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk menjelaskan dan menjawab segala hal yang berkaitan dengan langkah-langkah dari seluruh proses dan keputusan yang dibuat, serta bertanggung jawab atas hasil dan kinerja. Perundang-undangan seperti UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mendorong peningkatan sistem akuntabilitas Pondok Pesantren (IAI, 2017).

Pesantren harus meningkatkan standar pengajaran dan pengelolaan keuangan untuk mendapatkan akreditasi. Dengan demikian, pentingnya akuntansi keuangan pesantren jelas akan semakin meningkat. Salah satu faktor

yang memengaruhi seberapa baik operasi sekolah adalah keuangan. Keuangan pesantren juga disebut akuntansi pesantren. Akuntansi pesantren mencakup berbagai tahap, seperti perencanaan dan pengaturan; terkemuka; pemantauan; dan pengendalian. Sistem akuntansi komprehensif yang memantau setiap sen yang dihabiskan di pesantren meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (PAP, 2018).

Pedoman Akuntansi Pesantren diterbitkan pertama kali bertepatan dengan kegiatan Indonesia *Sharia Economic Festival* (ISFF) yang ke-64 di *Grand City Convention Center* Surabaya pada hari Rabu 08 November 2017 dan mulai efektif Per Mei 2018 (Bashori, 2018). Pondok Pesantren sebagai lembaga Nirlaba, SAK yang digunakan sebagai acuan adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Pertimbangan SAK ETAP sebagai acuan dari Pedoman Akuntansi Pesantren ini adalah aset yang dimiliki Pondok Pesantren nilainya relatif besar dan sebagian besar aset dan Pondok Pesantren merupakan waqaf permanen yang berupa tanah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020, penyusunan laporan keuangan Entitas Non-Laba tidak lagi mengacu pada PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba melainkan beralih acuannya ke ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. PSAK 45 secara efektif telah dicabut dan tidak dapat digunakan lagi melalui PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45. Sebagai gantinya DSAK IAI menerbitkan ISAK 35 yang secara bersamaan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020 (Gustani, 2021).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) juga bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) menerbitkan Pedoman Akuntansi Pondok Pesantren dalam menyusun laporan keuangan yang bersifat tidak mengikat serta memberikan dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren (IAI, 2018). Komponen laporan keuangan Pondok Pesantren berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pedoman Akuntansi Pesantren ini hanya berlaku untuk entitas Pondok Pesantren yang berbadan hukum yayasan (PAP, 2018). Sehingga penyajian laporan keuangan yang harus disusun Pesantren sesuai dengan ISAK 35 tentang laporan keuangan organisasi Non-laba (IAI, 2020.)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Nurul Azmi (2019), Irzalifah Darmi (2021) dan Didik Rahman (2021) menunjukkan bahwa pondok pesantren belum membuat laporan keuangan sesuai standar Pedoman Akuntansi Pesantren. Pondok Pesantren hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran kas. Terdapat beberapa alasan mengapa pondok pesantren belum menyusun laporan keuangan sesuai standar Pedoman Akuntansi Pesantren diantaranya adalah karena kurangnya sumberdaya yang kompeten di bidang Akuntansi, serta pihak pondok pesantren kurang paham terkait standar akuntansi yang seharusnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pesantren yang awam terhadap pentingnya penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku umum. Pedoman Akuntansi Pesantren merupakan langkah yang sangat tepat untuk memperbaiki tata kelola keuangan pesantren,

termasuk tata kelola dalam pencatatan laporan keuangan di Pondok Pesantren. Maka selanjutnya tinggal menerapkan akuntansi pesantren pada laporan keuangan di pesantren yang sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren. Kondisi tersebut yang mendorong Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI) menerbitkan Pedoman Akuntansi Pesantren (IAI & BI, 2018).

Berdasarkan uraian diatas masih banyak Pondok Pesantren dalam penyajian laporan keuangannya belum sesuai dengan siklus akuntansi dan Pedoman Akuntansi Pesantren. Salah satunya yaitu Pondok Pesantren yang akan di teliti oleh peneliti yaitu Pondok Pesantren Al-Uzlah Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Hj. Yulia Rahma, Bapak Iden Mulyadi dan Ibu Fierda Nurhaliza selaku Pimpinan, Pengurus dan Bendahara Pondok Pesantren Al-Uzlah telah menjelaskan bahwa Pondok Pesantren Al-Uzlah belum menerapkan Pedoman Akuntansi Pesantren dan siklus akuntansi dalam pencatatan laporan keuangannya. Yang dimana laporan keuangan yang dibuat masih sederhana, yaitu hanya mencatat arus kas masuk dan keluar saja. Persoalan tersebut juga karena di Pondok Pesantren Al-Uzlah masih terdapat kesulitan dan kurangnya sumberdaya yang kompeten dalam bidang akuntansi dan memahami dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Penggunaan aplikasi keuangan pun juga belum sesuai dengan standar yang berlaku umum, termasuk dalam kategori organisasi nonlaba terutama dalam penyusunan laporan keuangannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terdapat di Pondok Pesantren tersebut yaitu mengenai penyajian laporan

keuangan di Pondok Pesantren Al-Uzlah Kabupaten Cianjur yang belum sesuai dengan standar Pedoman Akuntansi Pesantren. Maka dari itu, peneliti bertujuan untuk meneliti lebih dalam guna menganalisis Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren dalam Pencatatan dan Penyusunan Transaksi Keuangan Akuntansi Pesantren sebagai sebuah pertanggungjawaban yang berbentuk laporan keuangan di Pondok Pesantren Al-Uzlah Kabupaten Cianjur. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren Dalam Penyajian Laporan Keuangan di Pondok Pesantren Al-Uzlah di Pondok Pesantren Al-Uzlah Kabupaten Cianjur”**.

B. Rumusan Masalah

Mengingat konteks ini, yang menjadi fokus permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pencatatan transaksi dalam penyajian laporan keuangan di Pondok Pesantren Al-Uzlah Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al-Uzlah Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Pedoman Akuntansi Pesantren pada Pondok Pesantren Al-Uzlah Kabupaten Cianjur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pencatatan transaksi dalam penyajian laporan keuangan di Pondok Pesantren Al-Uzlah Kabupaten Cianjur.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al-Uzlah Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Pedoman Akuntansi Pesantren pada Pondok Pesantren Al-Uzlah Kabupaten Cianjur.

D. Manfaat Penelitian

Penyelesaian proyek ini diharapkan lebih dari sekedar persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana, namun lebih dari itu diharapkan memberi manfaat bagi berbagai pihak yaitu berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman tentang Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren dalam Penyajian Laporan Keuangan di Pondok Pesantren Al-Uzlah Cianjur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.). Dan juga dapat menambah pengetahuan wawasan tentang bagaimana penerapan pedoman akuntansi pesantren dalam penyajian laporan keuangan di Pondok Pesantren Al-Uzlah Kabupaten Cianjur yang benar dan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren yang diperoleh dengan kenyataan yang terjadi.

b. Bagi Pondok Pesantren Al-Uzlah

Bagi Pondok Pesantren Al-Uzlah diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi, masukan serta acuan untuk penyusunan laporan keuangan pesantren sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan pengetahuan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis.

